

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN FISIK DI KELURAHAN KAWANGKOAN
BAWAH KECAMATAN AMURANG BARAT
KABUPATEN MINAHASA SELATAN¹**

Oleh : Glently Teesen²

ABSTRAK

Realitanya fenomena yang terjadi di Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan pengamatan awal penulis menemukan tingkat partisipasi masyarakat di wilayah ini masih sangat rendah.

Sebagai salah satu kelurahan yang berkembang, dan merupakan ibukota kabupaten Minahasa Selatan, mulai terjadi pergeseran nilai masyarakat yang awal mulanya hidup bercirikan masyarakat pedesaan dimana kepekaan sosial masyarakat masih sangat terpelihara, berangsur-angsur berubah menjadi corak masyarakat kota, dimana kepekaan terhadap lingkungan sosial yang semakin berkurang. Fenomena ini menurut dugaan sementara penulis adalah akibat dari tidak adanya lagi peran dari masyarakat dalam menentukan pemerintahan seperti di desa, dimana masyarakat sangat berperan dan terlibat aktif menentukan pemimpin di desanya (pemilihan kepala desa), hal ini sangat berbeda dengan kepemimpinan yang ada di kelurahan, dimana pemerintah kelurahan (lurah) tidak lagi dipilih dari masyarakat, tetapi ditentukan oleh pemerintah kabupaten yang merupakan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah kabupaten.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangsih pemikiran/ide-ide dalam pelaksanaan pembangunan, karena dalam organisasi pemerintahan kelurahan kegiatan pembangunan terbesar adalah pembangunan yang dilaksanakan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, atau proyek-proyek pembangunan langsung ditentukan oleh pemerintah kabupaten, walaupun setiap tahunnya dilaksanakan musyawarah rencana pembangunan kelurahan, namun seringkali keputusan-keputusan yang telah disepakati dalam musyawarah tersebut harus kandas pada tingkat kecamatan, sehingga mencermati tidak/jarang ditindaklanjuti hasil musyawarah rencana pembangunan kelurahan tersebut berakibat pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam memberikan ide-ide pemikiran dalam rencana pembangunan.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan.

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan merupakan salah satu wujud kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu Faktor yang berpengaruh terhadap berhasil tidaknya program pembangunan dalam suatu wilayah. Partisipasi masyarakat di perlukan karena program pemerintah yang di laksanakan tidak lain adalah untuk masyarakat. Masyarakat seharusnya ikut bersama-Sama dengan pemerintah memberikan peran guna meningkatkan serta mempermudah jalannya pelaksanaan program pembangunan. Secara konseptual teoritik partisipasi melahirkan berbagai pendapat dari para ahli, di antaranya dari Keit Davis, Sastropoetra (2005:75) yang mengatakan bahwa: Partisipasi di definisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada laporan kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Keterlibatan atau keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan partisipasi pada setiap program pembangunan dapat berupa sumbangan pemikiran atau pemberian ide-ide keterlibatan secara fisik atau tenaga, serta ikut merasakan hasil-hasil pogram pembangunan itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut lebih lanjut Bintoro Tjoroamidjo (1993:207) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat adalah: Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan secara berkeadilan.

Dalam hal ini pemerintah di harapkan dapat melakukan pendekatan menumbuhkan partisipasi masyarakat. Satu hal yang perlu di ingat bahwa masyarakat tidak merasa memiliki apabila dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut, mereka tidak diikutsertakan. Selain itu dalam penyusunan program pembangunan, maka haruslah melibatkan masyarakat, karena sangat sulit rasanya apabila dalam pelaksanaan program pembangunan perencanaannya tidak melibatkan masyarakat. Jadi pemerintah harus bersama-sama masyarakat dalam penyusunan suatu rencana program pembangunan sampai pada pelaksanaannya. Dengan demikian, dapat dipahami pentingnya partisipasi untuk menggerakkan masyarakat dalam suatu rencana program pembangunan dan pencapaian sasaran yang di inginkan.

Diperlukan upaya untuk lebih meyakinkan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Keadaan seperti ini akan merubah sikap serta tindakan masyarakat dari apatis selanjutnya menjadi dukungan untuk berpartisipasi. Hal ini menunjukkan betapa besar peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi. Adapun partisipasi sebagai ketersediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri, Santoso Sastropoetra (1986:3). Selanjutnya dalam

Santoso Sastropoetra disebutkan bahwa jenis dan bentuk partisipasi adalah:

Partisipasi dengan pemikiran (*Psychological Partisipation*), partisipasi dengan pikiran dan tenaga atau partisipasi aktif (*actif Partisipation*), partisipasi dengan keahlian (*With Skill Partisipation*), partisipasi dengan barang (*Material Partisipation*), partisipasi dengan uang (*Money partisipation*), partisipasi dengan Jasa (*service Partisipation*), partisipasi dalam bentuk sumbangan spontan berupa Barang/Jasa. Apabila Jenis-jenis dan bentuk-bentuk partisipasi tersebut terus ditingkatkan secara terus menerus, maka segala program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga memungkinkan terjadinya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.

Realitanya fenomena yang terjadi di Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan pengamatan awal penulis menemukan tingkat partisipasi masyarakat di wilayah ini masih sangat rendah. Sebagai salah satu kelurahan yang berkembang, dan merupakan ibukota kabupaten Minahasa Selatan, mulai terjadi pergeseran nilai masyarakat yang awal mulanya hidup bercirikan masyarakat pedesaan dimana kepekaan sosial masyarakat masih sangat terpelihara, berangsur-angsur berubah menjadi corak masyarakat kota, dimana kepekaan terhadap lingkungan sosial yang semakin berkurang. Fenomena ini menurut dugaan sementara penulis adalah akibat dari tidak adanya lagi peran dari masyarakat dalam menentukan pemerintahan seperti di desa, dimana masyarakat sangat berperan dan terlibat aktif menentukan pemimpin di desanya (pemilihan kepala desa), hal ini sangat berbeda dengan kepemimpinan yang ada di kelurahan, dimana pemerintah kelurahan (lurah) tidak lagi dipilih dari masyarakat, tetapi ditentukan oleh pemerintah kabupaten yang merupakan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah kabupaten.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangsih pemikiran/ide-ide dalam pelaksanaan pembangunan, karena dalam organisasi pemerintahan kelurahan kegiatan pembangunan terbesar adalah pembangunan yang dilaksanakan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, atau proyek-proyek pembangunan langsung ditentukan oleh pemerintah kabupaten, walaupun setiap tahunnya dilaksanakan musyawarah rencana pembangunan kelurahan, namun seringkali keputusan-keputusan yang telah disepakati dalam musyawarah tersebut harus kandas pada tingkat kecamatan, sehingga mencermati tidak/jarang ditindaklanjuti hasil musyawarah rencana pembangunan kelurahan tersebut berakibat pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam memberikan ide-ide pemikiran dalam rencana pembangunan.

Partisipasi dalam hal tenaga yang diberikan oleh masyarakat di kelurahan kawangkoan kecamatan amurang barat sesuai dengan pengamatan awal penulis dirasa masih cukup baik, namun tidak serta merta masyarakat mau berpartisipasi dengan satu kali panggilan, dalam hal ini kepala lingkungan harus berkali-kali memanggil masyarakat lewat pengeras suara (corong) yang ada di masing-masing lingkungan untuk datang bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya partisipasi dalam bentuk uang dan barang yang diberikan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di kelurahan Kawangkoan sesuai dengan pengamatan awal penulis ditemukan adanya keberagaman, ada beberapa anggota masyarakat yang dengan senang hati memberikan partisipasi dalam bentuk uang maupun barang, namun ada pula yang menolak berpartisipasi dalam memberikan uang dan barang.

Fenomena yang diuraikan tersebut yaitu kurangnya partisipasi yang diberikan masyarakat didominasi oleh beberapa faktor yang menurut penulis masih menjadi dugaan sementara, yaitu dari faktor intern adalah kurangnya kemauan dan kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi, hal ini perlu adanya pembinaan dan motivasi dari aparat kelurahan. Faktor selanjutnya adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan dari masyarakat yang ada di kelurahan Kawangkoan akan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat yang hidup berdampingan untuk bersama-sama bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan, dan faktor yang terakhir adalah penghasilan atau tingkat pendapatan dari masyarakat itu sendiri, semakin besar tingkat pendapatan biasanya akan memberikan nilai partisipasi yang baik, namun semakin sedikit tingkat pendapatan akan memberikan nilai partisipasi yang buruk, walaupun hal tersebut tidak menjadi ukuran baku, namun ketiga faktor yang diuraikan mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Dengan uraian masalah yang disebutkan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam lagi melalui suatu penelitian ilmiah, yang menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik yang ada di kelurahan Kawangkoan bawah, kecamatan Amurang barat kabupaten Minahasa selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan di Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah: untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan di Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat.

Sedangkan hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini di harapkan menjadi masukan bagi Lurah dan masyarakat serta Instansi-Instansi yang terkait di dalamnya untuk pencapaian pelaksanaan program pembangunan pada wilayahnya.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat pemerintah yang dapat di jadikan sebagai sumber pustaka atau bahan bacaan, maupun mahasiswa yang ingin mengembangkan pengetahuan dalam kajian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

- c. Menambah khasana ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu pemerintahan serta upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partisipasi

Kata Partisipasi telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang diucapkan para ahli maupun Orang awam. Sampai saat ini belum ada pengertian atau defenisi yang dapat diterima secara umum tentang partisipasi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang yang dipakai dalam memberikan pengertian atau defenisi.

Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan keikutsertaan, turut serta mengambil bagian. Hal ini menunjukkan adanya unsur keterlibatan dari dalam suatu kegiatan. Secara Etimologi kata partisipasi berasal dari bahasa inggris yaitu: "*Participation* ialah kata benda orang ikut mengambil bagian, peserta, *TO Participate* adalah kata kerja, ikut mengambil bagian," "participation" adalah hal mengambil bagian". Wojowasito W.J.S. Poerwadarminto (1988:243).

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam partisipasi itu terkandung adanya keterlibatan diri dari seseorang atau kelompok orang dalam suatu kegiatan. Pernyataan ini kemudian di dukung oleh defenisi yang dikemukakan oleh The Liang Gie (1981:103) bahwa: "partisipasi adalah peserta, setiap orang yang turut serta dalam suatu kegiatan, partisipasi adalah pengikutsertaan suatu aktifitas untuk membangkitkan persamaan serta dalam kegiatan organisasi, turut dalam serta dalam organisasi.

Partisipasi adalah hal ikut sertanya setiap orang suatu kegiatan merupakan aktivitas dalam organisasinya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Bila kita hubungkan dengan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat dalam kedudukannya sebagai subyek pembangunan dituntut dalam memberikan sumbangan terhadap apa yang dibutuhkan dalam pembangunan. Kesediaan memberikan sumbangan ini bukan lahir begitu saja, akan tetapi terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu yang dicapai. Disamping juga adanya upaya-upaya yang kita lakukan oleh pemerintah dalam membangkitkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan adalah fungsi pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh S.P Siagaan (2004:99) bahwa: penggerakan adalah merupakan keseluruhan dari proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien seta ekonomis.

Terlepas dari peranan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi tersebut juga terdorong oleh adanya motivasi tertentu. Motivasi-motivasi yang juga dimaksudkan itu dapat kita lihat pada penjelasan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan banyak sekali ditentukan oleh:

1. Kebutuhannya,

2. Interst masyarakat,
3. Adat istiadat dan sifat komunal yang mengikat setiap anggota masyarakat satu sama lain

Menyimak penjelasan tersebut maka jelas bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan karena itu merupakan kebutuhan di dalamnya memuat berbagai kepentingan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat interaksi antara masyarakat itu sendiri dengan pemerintah. Interaksi yang dimaksud disini adalah adanya hubungan saling pengertian dan saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa ada hal tersebut maka pembangunan yang merupakan kebijakan pemerintah sulit diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Sehubungan dengan itu, H. Sumitro, S.P. Siagian (2004:103) memberikan keterangan sebagai berikut: Partisipasi masyarakat atas kebijaksanaan pemerintah yang tersalur dalam administrasi pembangunan ditentukan secara bertingkat-tingkat oleh:

1. Terdapatnya pemahaman timbal balik (mutual understanding) antara perangkat pemerintah di tingkat birokrasi pemerintah daerah dengan masyarakat yang bersangkutan.
2. Terdapat sikap solidaritas yang tinggi dari masyarakat atas good will dan political will pemerintah.
3. Tertampungnya kepentingan-kepentingan dari masyarakat oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.
4. Terdapat usaha-usaha motivasi dan simulasi yang dapat mendorong kreativitas masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat tergantung pada peranan pemerintah dalam memberikan dan menimbulkan stimulasi dan motivasi yang mengarah pada kreativitas masyarakat. Pemerintah dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sering mengalami hambatan-hambatan. Apabila hambatan yang di hadapi tersebut tidak dapat diatasi maka pemerintah terkadang mengadakan penekanan-penekanan dengan memberlakukan aturan-aturan yang ketat. Tetapi perlu disadari bahwa pengikut sertaan masyarakat dalam pembangunan dengan tekanan pada umumnya kurang tepat diberlakukan di Negara-negara demokrasi seperti Negara ini. Cara yang paling tepat adalah dengan persuasi atau dengan stimulation dan cara ini nampaknya baik demi kepentingan umum maka apabila persuasi dan stimulasi tidak berhasil barulah di jalankan paksaan atau tekanan.

B. Konsep Masyarakat

Untuk lebih memahami tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan seperti tercantum pada judul penelitian ini, maka perlu kiranya dikemukakan beberapa pengertian mengenai masyarakat.

Kata masyarakat dalam bahasa Inggris di Identikkan dengan *Society* (Latin) "Society" yang berarti kawan. Pengertian ini ternyata sesuai dengan kenyataan bahwa Masyarakat itu tidak daripada sekelompok manusia yang saling berhubungan dan bergaul. Berkaitan dengan pengertian tersebut Ralph Lington, S.P. Siagian (2004:65) sebagai berikut: "masyarakat adalah

merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah di tentukan.

Berdasarkan pengertian ini maka dapat dipahami bahwa untuk dapat dikatakan sebagai masyarakat maka harus merupakan kelompok manusia yang telah bermukim dan bekerja sama dalam suatu wilayah (tempat) tertentu. Lebih lanjut kemudian dijelaskan oleh Koentjaraningrat, Cholil Mansyur (1989:21-22) bahwa: masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berintegrasi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terkait oleh suatu identitas bersama. Selanjutnya Cholil Mansyur memberikan batasan sebagai berikut: masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, di persekutukan dengan cara-cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan merdeka.

Defenisi ini menunjukkan bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia selalu diatur oleh adanya cara-cara tertentu yang merupakan aturan. Manusia dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain, karena tidak semua kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi sendiri begitupun sebaliknya pada orang lain. Saling ketergantungan ini menimbulkan interaksi sosial. Interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat diketahuimelalui adanya kontak sosial (*Social Contact*) dan komunikasi yang terjadi di antara masyarakat. Adanya kontak sosial dan komunikasi itu sehingga masyarakat selalu kelihatan hidup penuh dengan kebersamaan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manusia hidup bersama atau bermasyarakat antara lain :

- Hasrat sosial, adalah hasrat untuk menghubungkan diri dengan orang lain atau kelompok lain.
- Hasrat meniru, yaitu hasrat untuk menyatakan secara diam-diam atau terang-terangan dari salah satu tindakan atau gejala.
- Hasrat berjuang,yaitu mengalahkan lawan atau orang lain.
- Hasrat bergaul, yaitu hasrat untuk bergabung dengan orang lain atau kelompok lain.
- Hasrat untuk memberitahukan.
- Hasrat untuk mendapatkan kebebasan.
- Hasrat Seksual, yaitu hasrat untuk mengembangkan keturunan.
- Hasrat untuk bersatu dan adanya kesamaan keyakinan.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa manusia yang hidup dalam suatu bentuk masyarakat ternyata mempunyai beberapa hasrat yang ingin dicapai. Kenyataan ini menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Hal ini terlihat bagaimana dalam masyarakat selalu ingin mengejar kepentingan dan kebutuhan bersama dengan masyarakat.

C. Konsep Pembangunan

Hakekat pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai, selanjutnya untuk memberikan ini S.P. Siagian (2004:13) memberikan defenisi sebagai berikut: pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian

usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam pembangunan itu sendiri terdapat inti pokok-pokok pengertian sebagai berikut :

- Pembangunan adalah merupakan suatu proses, berarti suatu keinginan yang terus menerus dilaksanakan.
- Pembangunan merupakan usaha sadar yang dilakukan.
- Pembangunan mengarah kepada modernitas, yang di artikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka peningkatan swasembada dan mengurangi ketergantungan dari pihak lain.
- Pembangunan dilaksanakan secara berorientasi pada pertumbuhan dan Perubahan.
- Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multidimensional.
- Bahwa kelima hal tersebut di atas ditunjukkan kepada usaha pembinaan bangsa (Nation Building) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan Negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya dijelaskan oleh Bintoro Tjokroamidjojo (1993:3-4) bahwa: pembangunan adalah suatu proses dinamis, kebijaksanaan harus memberi peluang kepada kenyataan tetapi harus mengandung kepastian dan kesinambungan bagi pelaksanaan yang fiktif menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dengan keridhoan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian pembangunan seperti yang telah di uraikan pada kutipan tersebut memberikan kejelasan bahwa pembangunan itu adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang di milik. Semua itu di maksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, baik dari segi kesejahteraan Rohani maupun Jasmani. Pembangunan sebagai upaya memperbaiki keadaan, dalam arti yang lebih buruk menjadi baik: pembangunan nasional adalah rangkaian usaha secara sadar berencana untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi program-program pembangunan yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Selain dilihat sebagai upaya memperbaiki keadaan, pembangunan juga dapat dilihat sebagai salah satu jalan untuk mengetahui segala potensi kreatif yang dimiliki oleh masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Jakob Oetama (1984:54) sebagai berikut: pembangunan berusaha menggerakkan dan menguakkan potensi kreatif yang ada dalam masyarakat. Untuk merangsang potensi kreatif itu maka pembangunan mempertimbangkan system nilai struktur yaitu hubungan-hubungan dan peranan-peranan yang ada dalam masyarakat.

Potensi yang dimiliki masyarakat seringkali terpendam dan untuk membangkitkan kembali harus melalui pembangunan. Potensi yang telah muncul melalui pembangunan tersebut sekaligus merupakan salah satu

factor yang dapat memperlancar jalannya roda pembangunan. Potensi-potensi yang dimaksudkan berupa budaya, ekonomi, nilai dan sebagainya.

D. Konsep Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik yang dimaksud adalah pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan. setiap kegiatan atau rentetan dari usaha proses pembangunan harus dikembangkan untuk meningkatkan nilai-nilai dan objek yang dilaksanakan agar dapat berubah ke arah yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

Jadi pembangunan fisik, Sastropoetara (2005:91) adalah rentetan kegiatan atau proses yang bisa meningkatkan nilai-nilai suatu objek yang lebih tinggi dengan mengarah kepada hal yang lebih tinggi lagi baik itu berupa pengadaan prasarana. Untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan dalam pembangunan fisik harus memperhatikan dan menentukan sifat dan bentuk dari objek, demikian pula dengan informasi yang jelas tentang hal-hal yang menyangkut tentang pembangunan fisik. Setiap pembangunan fisik yang dilaksanakan harus memperhatikan hal-hal yang terdapat dalam perencanaan seperti dana, lokasi dan waktu pelaksanaan, keuntungan yang diterima masyarakat, sifat dan bentuk dari proyek itu sendiri, agar apa yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut analisis partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Sedangkan dasar penelitian yang dilakukan adalah Survey yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau proses tertentu dengan memilih data atau menentukan ruang lingkup tertentu sebagai sampel yang dianggap representatif.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan Kawangkoan, yang meliputi:

- a. Pemikiran / Ide-ide
- b. Tenaga
- c. Uang, Materi / Barang
- d. Faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat

C. Jenis Dan Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di Lapangan dengan sumber data adalah informan, serta pihak-pihak terkait yang memahami dan relevan yang meliputi data dari focus penelitian ini.
- b. Data Sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh dari Instansi terkait, berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan dan buku-buku serta hasil

penelitian Ilmiah yang di anggap relevan dengan masalah dan tujuan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini di gunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam Study kepustakaan ini penulis berusaha menelaah berbagai bahan bacaan/Pustaka berupa buku-buku, majalah, surat kabar, undang-undang, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mempunyai relevansi dengan masalah yang di teliti.

b. Studi Lapangan (*field Research*)

Studi Lapangan ini dimaksudkan untuk melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah di tentukan secara langsung. Study lapangan di tempuh dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi yaitu pengamatan terhadap objek secara langsung.
2. Interview yaitu wawancara langsung dengan informan yang telah di tentukan.

E. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan cara purposive, dimana sampel dipilih dengan pertimbangan bahwa orang-orang yang di pilih di anggap dapat memberi keterangan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Lurah
2. Sekretaris Lurah
3. Generasi Muda
4. Pendeta/Gembala
5. Kepala Lingkungan dan Wakil
6. Tua-Tua Kampung

F. Analisis Data

Didalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan dan diseleksi menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban masalah yang diteliti. Adapun mengenai teknik analisis data diatas yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Jam'an Satori dan Aan Komariah (2010:39) dapat diterapkan melalui 3 alur penerapan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, pemerhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Dengan cara mereduksinya dengan meringkas, memberi kode, menelusuri tema, memberi gugus-gugus dan menulis memo. Lebih lanjut Miles dan Huberman, Sugiyono (2010:338) mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data

Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih, misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Lebih lanjut Miles dan Huberman, Sugiyono (2010:341) bahwa yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi data

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin sesuai dengan alur sebab akibat, dan proporsi. Kesimpulan juga diverifikasi, yaitu pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, tinjauan ulang pada catatan lapangan atau meminta respon atau komentar responden yang telah dijaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti, kekokohan dan kecocokannya.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, baik dengan melakukan wawancara dengan informan dan studi kepustakaan, maka akan dilakukan analisa terhadap setiap data dan fakta-fakta yang telah didapat melalui interpretasi dan penguraian masalah-masalah yang terjadi.

1. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Pada dasarnya pembangunan adalah pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Semakin tinggi peran serta masyarakat tersebut, maka semakin cepat pula pembangunan dapat terealisasi. Dengan keberadaan delegasi masyarakat dalam pembangunan sangatlah penting, dimana terbukanya kesempatan partisipasi masyarakat untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerahnya. Adapun bentuk- bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat kelurahan Kawangkoan Bawah adalah sebagai berikut:

a) Partisipasi dalam bentuk uang atau benda

Salah satu dari bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan di Kelurahan Kawangkoan Bawah adalah dalam bentuk uang atau benda, yaitu merupakan bantuan dana yang sifatnya menunjang kelancaran pelaksanaan dari program-program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk uang atau benda ini tentunya akan sangat mendukung pelaksanaan program pembangunan. Dimana bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang didukung berupa uang atau benda adalah merupakan suatu upaya yang sangat nyata, maka untuk itu pemerintah Kelurahan harus bijak dalam

mempergunakan anggaran-anggaran bantuan dana pembangunan, dengan demikian pembangunan akan berjalan dengan baik dan lancar.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan Kawangkoan Bawah dalam bentuk uang dan benda kurang berpartisipasi, dimana rata-rata masyarakat Kelurahan Kawangkoan tergolong masyarakat yang berpendapatan rendah, sehingga masyarakat merasa berat atau terbebani untuk turut serta memberikan partisipasi dalam bentuk uang atau dana.

b) Partisipasi dalam bentuk pikiran atau ide

Gagasan atau ide yang cemerlang dapat menunjang keberhasilan suatu rencana yang telah ditetapkan dan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, sumbangan pikiran berupa saran ataupun ide-ide sangat diharapkan dapat membantu dalam upaya pencapaian dan perbaikan program-program pembangunan yang akan dan telah dilakukan supaya mencapai hasil yang maksimal.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran atau ide adalah bentuk partisipasi yang tidak kalah pentingnya dari partisipasi masyarakat dalam bentuk uang atau benda yang biasanya disampaikan dalam musyawarah atau penyampaian program-program pembangunan Kelurahan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, partisipasi masyarakat Kelurahan Kawangkoan dalam bentuk pikiran dan ide masih sangat kurang, dimana masih ada masyarakat yang tidak ikut serta menyumbangkan pikiran dan ide yang cemerlang atau kreatif untuk keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan. Adapun yang menjadi faktor penyebab masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran dan ide adalah masih rendahnya tingkat pendidikan rata-rata penduduk (masyarakat), sehingga kurang mampu dalam mencetuskan ide-ide atau pikiran yang kreatif guna menyukseskan program-program pembangunan di Kelurahan.

c) Partisipasi dalam bentuk tenaga (gotong royong)

Tingkat partisipasi masyarakat yang paling sederhana dan lazim diberikan oleh anggota masyarakat dalam membantu menyukseskan pelaksanaan suatu program pembangunan adalah berupa tenaga atau dapat disebut dengan gotong royong. Gotong royong merupakan adalah pengerahan tenaga kerja tanpa bayaran untuk suatu proyek yang bermanfaat untuk umum atau yang berguna untuk pemerintah.

Dari uraian yang dipaparkan tersebut di atas bahwa aktifitas gotong-royong selalu diiringi dengan pengerahan tenaga tanpa pamrih untuk kepentingan umum atau bersama. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan program-program pembangunan, kegiatan gotong royong selalu dilaksanakan untuk meringankan pelaksanaan program-program pembangunan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan Kawangkoan dalam bentuk tenaga (Gotong-Royong) masih kurang.

2. Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyusunan Program-Program Pembangunan

Untuk melaksanakan suatu pembangunan partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan. Partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa partisipasi dalam kegiatan perencanaan, partisipasi ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan. Namun, tidak hal yang mudah dalam membangun partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha yang dapat membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Adapun hal yang dapat dilakukan adalah dengan pemberdayaan masyarakat oleh perangkat Kelurahan Kawangkoan. Diharapkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat, pembangunan Kelurahan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Kesesuaian Pembangunan dengan Hasil Musrenbang

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi dan kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasakan oleh masyarakat kurang ideal. Namun demikian, perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah yang sedang dihadapi. Pembangunan Kelurahan Kawangkoan Bawah hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila Kelurahan Kawangkoan Bawah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap atau paling tidak pembangunan yang dilakukan dapat mendukung kemajuan masyarakat, baik dalam kemajuan di bidang ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat. Namun pembangunan yang dilakukan khususnya pembangunan tersebut tidak akan dapat tercapai apabila masyarakat dan pemerintah tidak saling bekerjasama untuk kemajuan Kelurahan. Adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat tergantung kepada pemerintah Kelurahan yaitu lurah dan aparat Kelurahan, karena merekalah pemimpin atau aktor dalam terlaksananya pembangunan yang dilakukan, dimana pemerintah Kelurahan berperan dalam menumbuhkan kesadaran warga untuk berperan serta dalam pembangunan yaitu berpartisipasi untuk keberhasilan pembangunan. Di Kelurahan Kawangkoan Bawah pembangunan yang dilakukan masih relatif rendah, bahkan bisa dikatakan minim. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas untuk mengadakan rapat tidak ada, sehingga rapat atau pertemuan-pertemuan seringkali dilakukan di di rumah warga.

Suatu pembangunan dikatakan berhasil apabila pembangunan yang dilakukan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, tanpa ada yang merasa dirugikan. Namun pembangunan di Kelurahan Kawangkoan Bawah ada yang sudah dapat dinikmati oleh masyarakat. Adapun pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah pembangunan rumah layak

huni, dimana sudah lumayan banyak dan layak dihuni atau ditempati oleh masyarakat. Disamping pembangunan yang sudah dapat dinikmati oleh masyarakat, masih adanya pembangunan yang telah dilakukan di Kelurahan yang tidak dapat dinikmati, yaitu pembangunan sumur bor. Pembangunan sumur bor ini dirasakan oleh masyarakat tidak bermanfaat, dimana air yang dihasilkan dari pengeboran sumur ini tidak layak untuk dikonsumsi. Air yang dihasilkan adalah air yang keruh dan berbau, sehingga sangat tidak mungkin lagi masyarakat meminumnya.

4. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Keberhasilan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya tidak saja ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya melainkan juga oleh besarnya pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, Bintoro Tjokromidjojo (1993:53). Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini: mengikut sertakan factor-faktor kesadaran, minat dan bakat serta kreatif yang ada dalam kelompok untuk merencanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang ada pada kelompok-kelompok masyarakat, partisipasi adalah mengambil bagian atau turut menyusun, turut melaksanakan dan turut bertanggung jawab.

Mencermati penjelasan tersebut, maka dapat kita ketahui ada enam hal yang pokok yang perlu kita kembangkan bila ingin memperoleh partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun keenam hal tersebut adalah kesadaran, minat, kreatifitas, merencanakan atau menyusun dan melaksanakan. Apabila keenam hal tersebut dimiliki oleh masyarakat maka hal lain yang perlu diperhatikan adalah aspek kepemimpinan yang diterapkan oleh pemerintah desa beserta aparatnya didalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya, Bintoro Tjokromidjojo (1993:56).

Kepemimpinan perlu dikemukakan disini karena antara partisipasi masyarakat dan kepemimpinan setempat tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan yang lainnya. Bila terpisahnya maka dengan sendirinya akan mengurangi atau bahkan kehilangan kekuatan. Misalnya partisipasi masyarakat besar, namun karena pemerintah desa tidak dapat menerapkan kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi setempat, maka potensi tidak akan pernah di wujudkan seperti yang diharapkan, Pamudji (2000:17).

Dewasa ini diharapkan partisipasi masyarakat akan muncul dan tumbuh dari bawah sebagai inisiatif dan aktifitas yang lahir dari rasa tanggung jawab warga masyarakat dalam pembangunan pedesaan/kelurahan yang pada partisipasinya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam keputusan Presiden Republik Indonesia dengan nomor: 319/19/1978 dijelaskan bahwa: Berhasil tidaknya repelita akan tergantung pada banyaknya tanggapan pengertian dan partisipasi rakyat Indonesia dalam meyambut segala tantangan pembangunan ini secara positif guna meratakan jalan bagi cucu dan generasi yang akan datang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Dari penjelasan itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini mengarah pada peningkatan

kesejahteraan hidup di masa yang akan datang terutama bagi generasi penerus. Tanggapan, pengertian dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan akan mempercepat terelisasi suatu tujuan. Hal itu dimungkinkan karena potensi besar dalam pembangunan tergantung banyak pada potensi sumber daya manusia dan memiliki kemampuan yang besar pula.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih banyak dipengaruhi oleh sikap mental itu sendiri. Karenanya untuk mendapatkan partisipasi masyarakat terutama pada tingkat kelurahan harus diusahakan adanya perubahan sikap mental kearah perbaikan yang tanpa adanya tekanan-tekanan. Masyarakat juga harus merasa bahwa dalam pembangunan itu terdapat kebutuhan-kebutuhan mereka. Partisipasi dari segenap pribadi-pribadi dalam masyarakat merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam pembangunan. Partisipasi menyebabkan terjalannya kerjasama dalam masyarakat dan kerjasama ini perlu pengkoordinasian yang baik dari pimpinan, dalam hal ini dimaksudkan agar partisipasi tersebut berdaya guna secara efektif, Talizidhuhu Ndraha (1990:70).

Koordinasi akan berjalan dengan baik apabila jalur-jalur komunikasi dalam masyarakat berjalan seimbang. Komunikasi yang dimaksudkan adalah komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Dalam masyarakat Kelurahan Kawangkoan keadaan ini dapat terlaksana dengan baik apabila asas swadaya dan gotong-royong dilaksanakan secara missal dan menyeluruh dalam satu pola tertentu menggambarkan pencerminan kepentingan-kepentingan masyarakat dan individu-individu yang mendukungnya. Dengan demikian apa yang dilaksanakan sebagai proses pembangunan adalah merupakan milik bersama yang harus di pelihara dan di pertanggung jawabkan demi kesejahteraan bersama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Kawangkoan Bawah dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang meliputi:
 - a. Partisipasi masyarakat dalam bentuk ide atau pikiran, dalam penyaluran aspirasi yang dilakukan kebanyakan pemerintah kelurahan melakukan pendekatan dalam bentuk informal yaitu pertemuan di luar forum formal dengan aparat pemerintah kelurahan dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat.
 - b. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, masyarakat ikut terlibat berpartisipasi melalui tenaga ini dalam pelaksanaan pembangunan tanpa kecuai. Secara teknis sumbangan tenaga ini biasanya dilakukan secara gradual ataupun terjadwal sehingga memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang dalam menyumbangkan tenaganya. Bentuk partisipasi dalam bentuk tenaga ini adalah merupakan bentuk

- partisipasi yang paling banyak diberikan oleh masyarakat Kelurahan Kawangkoan Bawah.
- c. Partisipasi dalam bentuk uang atau materi, dipengaruhi pada tingkat pendapatan masyarakat. Namun pada kenyataannya, masyarakat kelurahan kawangkoan bawah merasa berat atau terbebani jika berpartisipasi dalam bentuk uang atau dana. Ini dikarenakan pendapatan masyarakat yang tergolong di bawah rata-rata.
2. Dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan kawangkoan bawah, ada faktor penghambat yang ditemui. Namun faktor penghambat tersebut dapat di tanggulangi dengan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, tingkat pendidikan masyarakat, serta pengarahan pemerintah kelurahan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

B. Saran

1. Diperlukan upaya dalam berbagai cara untuk merangsang masyarakat agar berpartisipasi seperti melakukan sosialisasi lebih kepada masyarakat pada setiap pembangunan yang akan dilaksanakan, pemberian motivasi kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang diikuti dengan tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan itu sendiri.
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan, antara lain: memberi dorongan dan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, tercipta kesadaran untuk menjaga serta dan merawat hasil pembangunan, serta ketersediaan fasilitas atau peralatan, dimana agar masyarakat mempunyai keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, fariied, 1997. Metode Penelitian Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan. Rajawali Pers, Jakarta.
- Gie, The Liang, 1981. Majalah Panji Masyarakat, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar, 2005. Pembangunan Untuk Rakyat. Cetakan ke lima PT. Pustaka, Jakarta.
- Karyadi, M, 1997, Kepemimpinan (Leadership). Cetakan ke tiga Politie, Bogor.
- Kharuddin, H. 2003. Pembangunan Masyarakat. Cetakan ke III, Bina Aksara, Jakarta
- Koentjaraningrat. 2004. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Cetakan III, PT. Gramedia, Jakarta..

- Sastropoetara, R. A. Santoso, 2005. Partisipasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam pembangunan. Cetakan ke lima, Gunung Agung. Jakarta
- Sirajuddin K, 1991. Upaya Peningkatan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Skripsi Sospol, Manado.
- Siagian, Sondang P. 2004. Filsafat Administrasi. Cetakan ke Lima. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Sudjana, Nana. 1991. Tuntutan Penyusutan Karya-karya Ilmiah. Sinar Baru, Bandung.
- Sugiono. 2001. Metodologi Penelitian Administrasi. Cetakan ke III. Alfabeta. Bandung.
- Tjokromidjojo, Bintoro, 1993. Perencanaan Pembangunan, Mas Agung, Jakarta
- Tjokromidjojo, Bintoro, 1992. Strategi Pembangunan Nasional. Gunung Agung, Jakarta.
- Usman, Husaini & Promo Setiadi Akbar, 2000. Metodologi Penelitian Sosial. Bumi Aksara, Jakarta.
- Wasistono, Sadu. 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah. CV. Fokusmedia. Bandung.